

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi berjumlah 3,78 juta jiwa dan kepadatan rata-rata 1.193 jiwa/km² di tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), angka ini menempatkan DIY sebagai provinsi keempat dengan kepadatan tinggi di Pulau Jawa, setelah DKI Jakarta (16.155 jiwa/km²), Jawa Barat (1.370 jiwa/km²), dan Banten (1.341 jiwa/km²). Selain itu, DIY menyumbang sekitar 1,33% populasi nasional, menempati urutan ke-21 di Indonesia.

Tabel 1.1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan, Persentase, dan Kepadatan Penduduk di DIY Tahun 2016-2025

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
2025	3.781,5	0,64	1,33	1.193
2024	3.759,5	0,65	1,34	1.186
2023	3.736,5	0,67	1,34	1.178
2022	3.761,9	1,44	1,36	1.186
2021	3.712,9	1,61	1,36	1.185
2020	3.668,7	0,58	1,36	1.171
2019	3.842,9	1,15	1,43	1.227
2018	3.802,9	1,16	1,43	1.214
2017	3.762,2	1,17	1,44	1.201
2016	3.720,9	1,18	1,44	1.188

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri, 2025

Dalam 10 tahun terakhir (Tabel 1.1.1), jumlah penduduk DIY naik dari 3,72 juta (2016) menjadi 3,78 juta (2025). Terdapat fluktuasi di tahun 2019 lebih tinggi 3,84 juta, kemudian turun di tahun 2020-2021. Rata-rata pertumbuhan tahunan cenderung melambat, hanya 0,64% di tahun 2025. Angka kepadatan tinggi dan relatif stabil, 1.171-1.227 jiwa/km². Secara umum, jumlah penduduk DIY tetap tinggi dan cenderung meningkat meskipun laju pertumbuhan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa DIY bukan wilayah dengan ledakan penduduk, tapi dengan kepadatan tinggi yang relatif permanen.

Tabel 1.1.2 Distribusi Kepadatan Penduduk DIY Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Urutan Kepadatan Tertinggi
Kota Yogyakarta	375,78	32,82	11.448	1
Sleman	1.168,47	573,75	2.036	2
Bantul	1.017,75	511,71	1.988	3
Kulon Progo	445,32	577,22	771	4
Gunungkidul	752,19	1.475,15	510	5
DI Yogyakarta	3.759,50	3.170,65	1.186	-

Sumber: Databoks.katadata.co.id dan Badan Pusat Statistik, 2024

Distribusi kepadatan penduduk di DIY tahun 2024 (Tabel 1.1.2) menunjukkan adanya disparitas atau kesenjangan spasial yang signifikan antar kabupaten/kota. Kota Yogyakarta menjadi titik krisis ruang menempati urutan pertama dengan kepadatan tertinggi, mencapai 11.448 jiwa/km² pada luas wilayah 32,82 km². Di sisi lain, Kabupaten Sleman (2.036 jiwa/km²) dan Bantul (1.988 jiwa/km²) menunjukkan dampak tren urbanisasi yang mendorong meningkatnya tekanan kebutuhan ruang di kawasan penyangga kota.

Tabel 1.1.3 Jumlah Penduduk DIY yang Memiliki Akta Kematian Tahun 2021-2025

Tahun	Akumulasi Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kematian (jiwa)	Selisih Tahun Sebelumnya
2025	542.805	27.946
2024	514.859	44.822
2023	470.037	37.891
2022	432.146	45.398
2021	386.748	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, dan Pencatatan Sipil, 2025

Tekanan kepadatan penduduk semakin terasa nyata didukung oleh data akumulasi jumlah penduduk yang memiliki akta kematian (Tabel 1.1.3). Dalam empat tahun terakhir (2022-2025), tercatat penambahan dengan rata-rata 39.014 jiwa/tahun dan setidaknya paling rendah sebanyak 27.946 jiwa dalam satu tahun berjalan (2025). Angka ini tidak otomatis berarti seluruh jenazah dimakamkan di wilayah DIY, lokasi pemakaman bergantung pada keputusan keluarga dan ketersediaan lahan di berbagai daerah.

Meski demikian, tren peningkatan jumlah kematian tetap menjadi indikator penting adanya tekanan spasial, karena sebagian besar penduduk

yang meninggal cenderung dimakamkan di wilayah tempat tinggalnya. Dengan kepadatan tinggi di Kota Yogyakarta dan keterbatasan lahan yang hampir penuh, tambahan ribuan kasus kematian tiap tahun tetap berpotensi memperbesar beban pada sistem pemakaman kota.

Tingginya kepadatan tidak hanya berimplikasi pada kebutuhan hunian dan infrastruktur kota, tetapi juga menimbulkan tekanan signifikan pada ketersediaan lahan pemakaman. Survei lapangan oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pemakaman DPRD Kota Yogyakarta (19 Mei 2025) menemukan bahwa 80 hingga 90 persen lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Kota (Pemkot) mencakup Makam Pracimaloyo, Sasonoloyo, Sariloyo, dan Utaraloyo di Kota Yogyakarta telah penuh (Gambar 1.1.1). Ketua Pansus, Taufiq Setiawan, menegaskan bahwa kondisi ini mendesak ditindaklanjutinya revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pemakaman.



*Gambar 1.1.1 Panitia Khusus Raperda Pemakaman Melakukan Survei Lapangan ke Empat TPU Milik Pemkot
(Sumber: DPRD Kota Yogyakarta, 19 Mei 2025)*

Pemkot Yogyakarta mulai menyiapkan berbagai skema untuk mengatasi persoalan penuhnya lahan pemakaman. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Sigit Setiawan (21 Agustus 2025), mengatakan bahwa salah satu opsi yang akan dilakukan adalah pembelian atau penyediaan lahan baru di kawasan penyangga kota, seperti Bantul atau Sleman yang berjarak 8 hingga 9 kilometer dari pusat kota. Selain itu, strategi optimalisasi juga dilakukan dengan mekanisme tumpang makam.

DPRD Kota Yogyakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pemakaman (12 September 2025), regulasi baru ini menggantikan Perda Nomor 7 Tahun 1996 yang dinilai sudah

tidak relevan. Tiap petak makam di TPU Pemkot memiliki syarat dan ketentuan makam tumpang yang baru, di antaranya adalah adanya hubungan keluarga atau izin tertulis dari ahli waris, serta jenazah yang telah dikubur minimal tiga tahun sebelumnya.

Konsep pemakaman humanis disusun untuk menjadi solusi keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta. Area antarpetak makam direncanakan ditata lebih rapi, ditanami rumput, dan dipelihara terpusat sehingga tidak menimbulkan kesan kumuh, berdempetan, maupun menyeramkan (Gambar 1.1.2). Kepala DPUPKP, Sigit Setiawan, menambahkan bahwa optimalisasi lahan akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan mekanisme pengumuman publik. Makam dapat dimanfaatkan kembali sesuai perda baru apabila dalam enam hingga tujuh bulan tidak ada ahli waris yang mengajukan keberatan.



*Gambar 1.1.2 Suasana Makam yang Berdempetan di TPU Pracimalaya
(Sumber: Silvy Dian Setiawan, 2023)*

Namun, strategi penambahan lahan dan kebijakan makam tumpang pada dasarnya masih mengandalkan pola pemakaman horizontal yang membutuhkan luasan tanah baru. Solusi ini menimbulkan ketergantungan pada ketersediaan lahan dan membutuhkan pendekatan alternatif yang lebih berkelanjutan. Tipologi pemakaman vertikal menjadi solusi sebagai strategi penghematan lahan sekaligus solusi perencanaan kota yang berkelanjutan (Hariyono, 2015). Desain pemakaman vertikal dapat diintegrasikan ke dalam kawasan perkotaan tanpa bergantung pada pembukaan lahan baru.

Berangkat dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di Kota Yogyakarta, pemakaman vertikal dipilih sebagai alternatif yang berkelanjutan. Tipologi ini tidak hanya menjawab persoalan spasial akibat keterbatasan lahan perkotaan, tetapi juga membuka peluang

untuk menghadirkan ruang pemakaman yang lebih tertata, efisien, dan selaras dengan prinsip perencanaan kota berkelanjutan.

1.1.2 Latar Belakang Permasalahan

Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya sekaligus kota pelajar, sehingga populasi keberagaman agama atau *multifaith* dari pendatang yang menetap maupun warga lokal tidak dapat dipisahkan. Isu pemakaman dalam ruang kota tidak lepas dari konteks keberagaman agama yang hidup berdampingan, realitas ini membawa konsekuensi pada kebutuhan ruang pemakaman sebagai ruang inklusif yang dapat mewadahi praktik ritual lintas agama.

Tabel 1.1.4 Jumlah Penganut Agama di DIY Tahun 2020-2024

Agama	Jumlah Penduduk (jiwa)					Urutan Penganut Tertinggi
	2024	2023	2022	2021	2020	
Islam	3.469.496	3.460.903	3.433.129	3.415.882	3.408.041	1
Katolik	164.685	164.690	164.474	165.191	166.401	2
Protestan	90.125	89.956	89.408	89.454	89.715	3
Hindu	3.372	3370	3.396	3.421	3.432	4
Budha	2.957	2969	3.007	3.070	3.126	5
Konghucu	59	60	65	72	84	6

Sumber: Kementerian Agama, 2024

Berdasarkan data Kementerian Agama (Tabel 1.1.4), penduduk DIY didominasi oleh pemeluk agama Islam dengan jumlah mencapai 3,46 juta jiwa (2024), diikuti Katolik 164 ribu jiwa, Protestan 90 ribu jiwa, serta Hindu, Buddha, dan Konghucu yang jumlahnya jauh lebih kecil. Data ini menunjukkan dominasi mayoritas Islam (92%) terhadap minoritas yang meskipun proporsinya kecil, tetap memiliki kebutuhan ruang ritual dan pemakaman yang sama pentingnya.

Tabel 1.1.5 Jumlah Kelompok Lanjut Usia Terlantar 2021-2024

Tahun	Jumlah Kelompok Lanjut Usia Terlantar per Tahun (jiwa)	Selisih Tahun Sebelumnya
2024	23.301	2.479
2023	25.780	745
2022	26.525	6.604
2021	33.129	-

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2024

Selain itu, kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) terlantar juga menghadapi keterbatasan dalam memperoleh tempat pemakaman yang layak

karena tidak ada keluarga yang mengurus atau tanpa ahli waris. Berdasarkan data Dinas Sosial DIY (2024), jumlah rata-rata kelompok lansia terlantar mencapai 27.183 jiwa/tahun. Angka tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 33.129 jiwa, kemudian menurun menjadi 23.301 jiwa pada tahun 2024. Jumlah Tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan kesejahteraan sosial, namun tetap meninggalkan kelompok rentan (Gambar 1.1.3) yang memerlukan perhatian termasuk dalam konteks pemakaman bagi lansia terlantar yang tidak memiliki keluarga atau ahli waris.



Gambar 1.1.3 Suasana Lansia Bergelora Raga di UPT RPSLUT Budhi Dharma
(Sumber: Dinsosnakertrans, 26 Juli 2024)

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pemakaman di Yogyakarta tidak hanya terkait perbedaan agama, tetapi juga menyangkut aspek keadilan sosial dan penghormatan martabat manusia, di mana setiap individu berhak atas ruang peristirahatan terakhir yang layak, tanpa memandang latar belakang kepercayaan maupun status sosial.

Oleh karena itu, penulis tertarik membahas pemakaman *multifaith* untuk Kota Yogyakarta dengan pendekatan *Sacred Space*. Pendekatan ini menjadi relevan karena dapat memberikan paradigma baru mengenai pemakaman yang tidak lagi hanya dimaknai sebagai tempat penguburan. Namun, diartikan sebagai ruang sakral yang merepresentasikan nilai kemanusiaan dan spiritualitas secara universal sejalan dengan identitas Yogyakarta sebagai kota toleran.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana konsep perancangan tata ruang dalam dan furnitur yang mengedepankan nilai inklusif dan kontemplatif pada pemakaman vertikal *multifaith* untuk Kota Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan *Sacred Space*?

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari perancangan proyek ini adalah:

1. Merancang konsep tata ruang dalam dan furnitur pemakaman vertikal *multifaith* yang mengakomodasi kebutuhan ritual lintas agama untuk Kota Yogyakarta.
2. Mengintegrasikan pendekatan *Sacred Space* untuk menciptakan ruang yang inklusif, kontemplatif, dan mampu memberikan pengalaman spiritual yang setara bagi semua pemeluk agama.

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran dari perancangan proyek ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik tiap komunitas agama terkait ruang ritual, furnitur, serta tata ruang pemakaman yang sesuai dengan tradisi masing-masing.
2. Menerapkan prinsip *Sacred Space* dalam rancangan ruang dan furnitur untuk menciptakan atmosfer sakral, inklusif, dan kontemplatif.
3. Menyajikan rancangan akhir pemakaman vertikal *multifaith* yang berfungsi sebagai alternatif pengelolaan ruang pemakaman perkotaan, sekaligus menjadi simbol toleransi dan keberagaman di Kota Yogyakarta.

1.4 ESENSI PROYEK

Proyek ini merupakan perancangan pemakaman vertikal *multifaith* untuk Kota Yogyakarta dengan pendekatan *Sacred Space* guna menghadirkan ruang pemakaman yang lebih inklusif, kontemplatif, dan berkelanjutan. Rancangan ini tidak hanya menjawab persoalan keterbatasan lahan, tetapi juga mewadahi praktik ritual dari berbagai agama dalam satu kompleks yang setara dan harmonis. Proyek ini berupaya menciptakan pemakaman yang bukan sekadar tempat penguburan, tetapi juga ruang refleksi, penghormatan, dan kontemplasi yang relevan dengan nilai sosial budaya Yogyakarta sebagai kota toleran.

1.5 LINGKUP PEMBAHASAN

1.5.1 Lingkup Spasial

Lingkup spasial perancangan berfokus pada tata ruang dalam bangunan pemakaman vertikal untuk Kota Yogyakarta, meliputi ruang persemayaman, area ritual, furnitur pendukung, serta integrasi dengan ruang luar yang mendukung fungsi kontemplatif dan penghormatan.

1.5.2 Lingkup Substansial

Lingkup substansial mencakup penerapan pendekatan *Sacred Space* dalam merancang tata ruang dan furnitur yang mampu mengakomodasi keberagaman ritual lintas agama. Desain menitikberatkan pada inklusivitas, pengalaman spiritual, serta nilai kontemplatif yang dapat dirasakan oleh semua pengguna tanpa memandang latar belakang agama.

1.5.3 Lingkup Temporal

Lingkup temporal mempertimbangkan keberlanjutan rancangan pemakaman vertikal sebagai respons jangka panjang terhadap keterbatasan lahan perkotaan. Desain diproyeksikan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan demografi, dinamika *multifaith*, serta perkembangan kebutuhan masyarakat di masa depan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang pengadaan proyek dan permasalahan, penyusunan rumusan masalah, tujuan-sasaran, lingkup pembahasan, dan alur pikir.

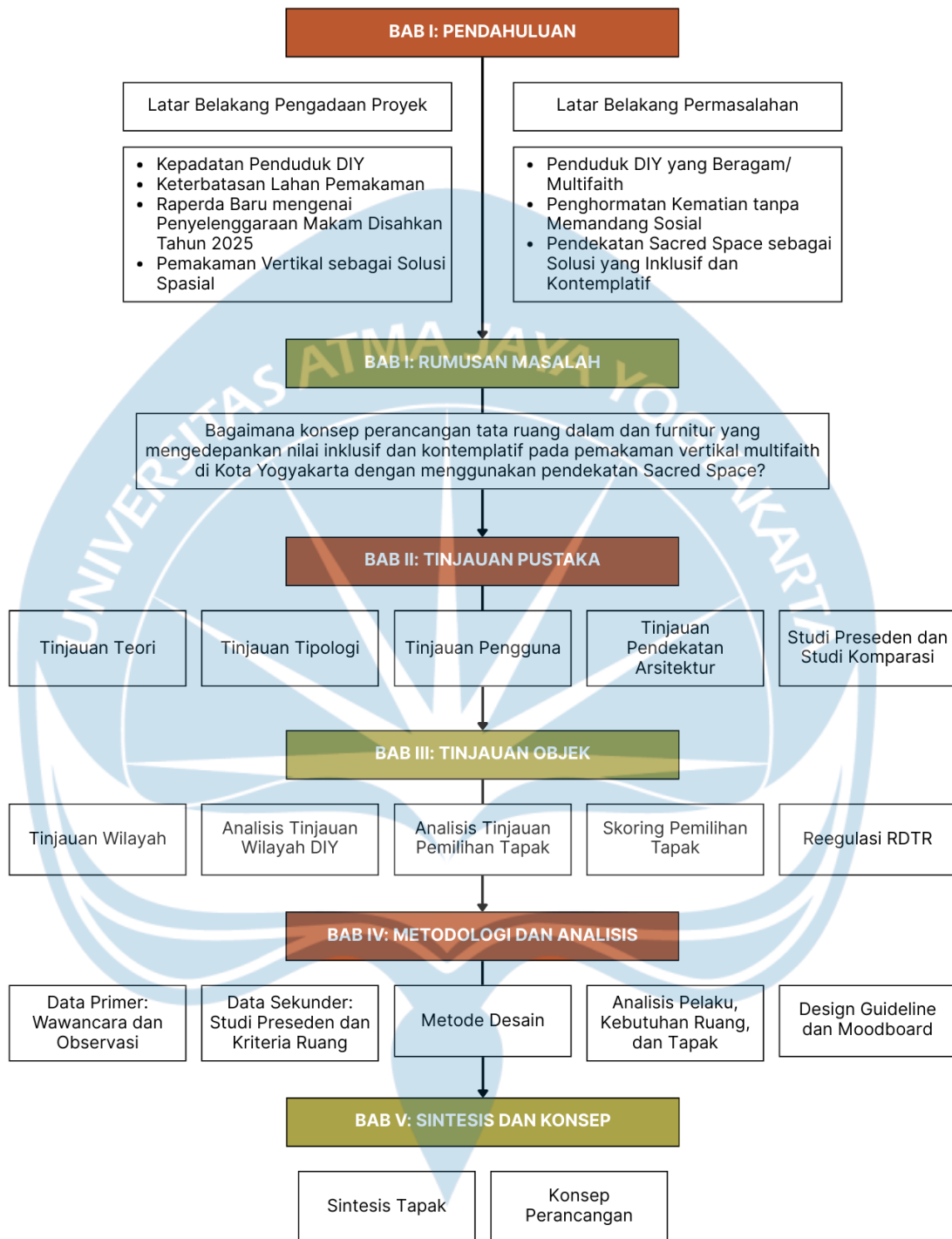
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, mencakup kajian mengenai teori, tipologi, pengguna, pendekatan arsitektur, dan preseden yang digunakan.

BAB III: TINJAUAN OBJEK, berbagai analisis penentuan wilayah yang digunakan meliputi: penentuan wilayah Kota Yogyakarta, Bantul, dan tapak.

BAB IV: METODOLOGI DAN ANALISIS, metodologi yang digunakan untuk penelusuran data dan analisis data mencakup pelaku, tapak, ruang, serta *design guideline* dan *moodboard* sebagai referensi artikulasi desain.

BAB V: SINTESIS DAN KONSEP, uraian mengenai sintesis dari analisis dan konsep bangunan yang diusung.

1.7 ALUR PIKIR



Gambar 1.7.1 Diagram Alur Pikir (Sumber: Analisis Penulis, 2025)